

Strategi Pemerintah Taiwan dalam Meningkatkan Ekspor Agrikultur melalui *Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)*

Azalia Ayu Pramesti¹, Adiasri Putri Purbantina²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

The relationship between China and Taiwan since separating in 1949 continues to fluctuate, particularly with the One China Policy. However, despite the political tension between the two, they have close bilateral economic ties relations, where China is Taiwan's largest trading partner. China and Taiwan signed an agreement entitled "Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement" (ECFA) in 2010. The ECFA challenges Taiwan's agricultural sector. This paper evaluates how the Taiwanese government response to boost the competitiveness of their agricultural exports through three channels: 1) foreign policies, 2) trade regulations, and 3) supports to domestic firms.

Keywords: *Free Trade Agreement, Foreign Policy, Trade Regulations, Firms*

ABSTRAK

Hubungan Tiongkok dan Taiwan sejak berpisah pada tahun 1949 terus berfluktuasi, terutama dengan adanya Kebijakan Satu Tiongkok. Namun, meski terjadi ketegangan politik di antara keduanya, mereka memiliki hubungan ekonomi bilateral yang erat, dimana Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Taiwan. Tiongkok dan Taiwan menandatangani perjanjian bertajuk "Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi Lintas Selat" (ECFA) pada tahun 2010. ECFA menantang sektor pertanian Taiwan. Tulisan ini mengevaluasi bagaimana respons pemerintah Taiwan untuk meningkatkan daya saing ekspor pertanian mereka melalui tiga jalur: 1) kebijakan luar negeri, 2) peraturan perdagangan, dan 3) dukungan kepada perusahaan dalam negeri.

Keywords: Perjanjian Perdagangan Bebas, Kebijakan Luar Negeri, Peraturan Perdagangan, Perusahaan

PENDAHULUAN

Hubungan Cina dan Taiwan tak luput dari konflik sejak berpisah pada tahun 1949, yang mana dulunya Taiwan termasuk pulau di daratan Cina dan status Taiwan seringkali diuji karena Pemerintah Cina masih sering menganggap Taiwan merupakan salah satu provinsi Republik Rakyat Cina didukung dengan 'One China Policy'. Meskipun telah ditandatangani Konsensus tahun 1992 yang disepakati oleh masing-masing perwakilan Partai Komunis Cina (PKC) dan partai politik Kuomintang (KMT), Beijing dan Taipei masih tidak setuju tentang kemerdekaan Taiwan itu sendiri dan masih bersikukuh dengan 'One China' atau hanya ada 'Satu Cina'. Posisi Taiwan yang demikian, menyulitkan hubungannya dengan dunia luar, misalnya dengan Amerika Serikat (AS) yang pada era Presiden Jimmy Carter mengakui bahwa hanya ada satu Cina dan Taiwan adalah bagian dari Cina serta memutus hubungan

hubungan secara diplomatik dengan Taiwan yang kemudian baru diperbaiki dengan adanya undang-undang bilateral baru yaitu Taiwan Relations Act (TRA). Setelah kemunculan DPP (oposisi dari KMT) pada 1986 dan di sahkan pada 1989, secara tradisional menyerukan Taiwan merdeka secara de jure sebagai entitas politik independen, dan menjadi tanda untuk ekspresi identitas Taiwan. Cina dan Taiwan menjalin hubungan yang cukup erat dalam berbagai aspek seperti relasi ekonomi meskipun dengan latar belakang hubungan yang cukup konfliktual, walaupun ketika awal terpilihnya terpilihnya presiden Xi Jinping pada 2012 Cina sempat bersikap tegas terhadap wilayah yang diklaimnya termasuk Hong Kong, Tibet, Xinjiang, dan Taiwan. Ketika terpilihnya Tsai Ing-wen di sebagai presiden Taiwan pada 2016, membawa udara segar bagi hubungan keduanya dan mengatur ulang hubungan diplomatik formal dengan Cina (Albert, 2016).

Terlepas dari 59roport antara Cina dan Taiwan, hubungan ekonomi keduanya berkembang dengan cukup baik erat bahkan sejak tahun 1970 setelah kebijakan reformasi diterapkan pada kepemimpinan Presiden Deng Xiaoping, Taiwan sudah mulai berinvestasi di Cina. Pada 11 Desember 2001, Cina masuk menjadi anggota World Trade Organization (WTO) yang kemudian disusul dengan keanggotaan Taiwan sebagai anggota WTO sebulan kemudian sebagai “Chinese Taipei”. Keduanya sepakat bahwa bank, 59roperty 59n asuransi, dan penyedia layanan keuangan lainnya boleh beroperasi baik di Cina maupun di Taiwan, pada tahun 2014 perdagangan bilateral antara China dan Taiwan melejit hingga \$ 198,31 miliar, angka tersebut mengalami kenaikan dari \$ 8 miliar pada tahun 1991. Pada masa kepemimpinan Presiden Ma Ying-jeou, Taiwan menandatangani kurang lebih 20 pakta kesepakatan dagang termasuk Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA), dan perekonomian Taiwan mengalami keuntungan yang cukup besar, namun kekhawatiran muncul ketika perekonomian Taiwan tumbuh hanya 0,85 persen dan pengangguran kaum muda hampir 13 persen pada 2015, dan harga 59roperty melonjak.

Pada 29 Juni 2010, Cina dan Taiwan menandatangani perjanjian dagang bilateral yang bertajuk “Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement” (ECFA) yang sebenarnya ditandatangani oleh dua partai di kedua negara tersebut yakni antara Taiwan’s Strait Exchange Foundation (SEF) dan China’s Association for Relations across the Taiwan Strait (ARATS) dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada WTO (WTO, 2021). ECFA sendiri merupakan kesepakatan antara Cina dan Taiwan yang membentuk area perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA) antara keduanya yang diawali dengan daftar barang industri, manufaktur, dan jasa yang dinamakan dengan “early harvest list”. Secara tidak langsung, keduanya menjadi mitra perdagangan alami, hal ini dibuktikan dengan lonjakan investasi asing atau foreign direct investment (FDI) dari Cina ke Taiwan pada awal 1990-an yang mengakibatkan ketergantungan perekonomian Taiwan terhadap Cina sangat tinggi. Tercatat FDI yang diluncurkan Cina ke Taiwan meningkat dari US \$ 1.830 juta pada tahun 1991 menjadi US \$ 16.432 juta pada tahun 2007 dan menjadi puncak tertinggi FDI dari Cina ke Taiwan (Hong, 2011).

“Under the ECFA, China will gradually lower tariffs for 539 categories of imports and open 11 service categories and 18 farm and fishery categories to trade while Taiwan has agreed gradually to reduce tariffs on 267 items, most of which

are industrial components. These policy measures will be phased in over time to minimise the cost of adjustment.”(Armstrong, 2013, p. 99)

Bergulirnya ECFA pada 1 Januari 2011 menuai pro dan kontra, diantara yang pro dengan perjanjian ini berpendapat bahwa efek dari ECFA sendiri dapat membantu Taiwan agar tidak termarginalkan dari perdagangan internasional. Selain itu, ECFA memungkinkan perusahaan Taiwan ke Cina lebih awal masuk di beberapa industri, khususnya sektor keuangan, dan ECFA akan meningkatkan daya saing industri Taiwan karena persamaan budaya Taiwan dan Cina yang secara tidak langsung menguntungkan perusahaan-perusahaan Taiwan. Kontra yang muncul karena perjanjian ini adalah tidak ada urgensi dari kesepakatan dagang bilateral antara Cina dan Taiwan, pihak oposisi beranggapan bahwa akan tumpang tindih dengan perjanjian antara Cina dan ASEAN, kemudian ECFA juga akan memperburuk distribusi pembagian upah bagi tenaga kerja di Taiwan (Hong, 2011). Dalam tulisan Chow (2012), mengatakan bahwa Taiwan sebenarnya tidak memiliki keunggulan komparatif dari Cina dalam komoditas agrikultur dan apabila perdagangan dengan Cina sepenuhnya diliberalisasi dalam ECFA tersebut, maka sektor pertanian Taiwan akan terancam turun.

Dalam *“early harvest list”* berbagai produk-produk yang dipasarkan baik di pasar Taiwan maupun Cina dengan ketentuan-ketentuan tertentu, salah satu produk unggulan yang dimiliki Taiwan dan termasuk dalam daftar produk di ECFA adalah produk agrikultur dan cukup menjanjikan performanya bagi Taiwan (Liu, 2012). Faktanya adalah dalam ECFA Taiwan tidak membuka pasar mereka untuk berbagai produk agrikultur dari Cina serta tidak mengizinkan tenaga kerja dari Cina ke Taiwan (Mainland Affairs Council, 2021). Ada 18 produk pertanian dan perikanan yang masuk dalam daftar pengurangan tarif di ECFA, antara lain anggrek, pisang, jeruk, teh, ikan hidup dan beku yang akan lebih menguntungkan Taiwan dalam sektor agrikultur dibanding Cina (Ahn, 2014). Sektor pertanian di Taiwan memerankan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan Taiwan. ICDF telah bermitra dengan banyak negara dalam proyek-proyek pertanian, bahkan proyek pertanian telah menjadi bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Taiwan sejak 1959 dengan mengirim bantuan teknis pertanian pertama ke Vietnam (Taiwan ICDF, n.d.).

Dari tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, literatur banyak membahas tentang dampak ECFA pada beberapa sektor seperti investasi dan perikanan serta hubungan dagang keduanya setelah ECFA berlaku pada 2011. Dalam satu jurnal Ahn (2014) yang membahas tentang dampak ECFA terhadap pasar ikan kerapu di Taiwan dan Cina, sempat menyinggung perihal sektor agrikultur Taiwan lebih diuntungkan dalam ECFA karena larangan terhadap produk agrikultur Cina ke Taiwan. Namun dalam jurnal lain, seperti yang sudah disebutkan di atas, apabila perdagangan dengan Cina diliberalisasi sepenuhnya maka sektor agrikultur akan mengalami penurunan karena akan kalah dengan produk agrikultur Cina (Chow, 2012).

Tulisan ini meninjau lebih lanjut bagaimana kebijakan Pemerintah Taiwan dalam mendorong ekspor produk agrikultur Taiwan yang berpotensi dirugikan dalam ECFA Cina-Taiwan tahun 2011-2018. Pengambilan jangkauan waktu penelitian disesuaikan dengan tahun berlakunya ECFA (per 1 Januari 2011) hingga tahun 2018 yaitu puncak ekspor agrikultur

tertinggi di Taiwan (seperti yang sudah dijelaskan diatas). Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam tulisan ini adalah: “Bagaimana respons Pemerintah Taiwan dalam mendorong ekspor produk agrikultur Taiwan sebagai dampak perjanjian Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) Cina-Taiwan (2011-2018)?”

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori Free Trade Agreement atau FTA yang menurut Krueger (1997) merupakan kegiatan perdagangan bebas yang merujuk pada mekanisme pengurangan tarif menjadi nol untuk semua transaksi perdagangan baik barang maupun jasa pada transaksi dagang antar negara anggota. Dengan catatan bahwa FTA tidak menghilangkan hambatan pada perdagangan eksternal dan hanya akan menghilangkan hambatan perdagangan dengan negara anggota saja. Negara-negara yang melakukan FTA sebenarnya juga memiliki resiko karena perbedaan tarif, seperti 'defleksi perdagangan' (kondisi dimana barang maupun jasa diangkut ke negara anggota lainnya dengan biaya terendah), regulasi dalam FTA yang memungkinkan negara asal untuk 'mengirim' aturan atau perlindungan pada produsen asal negara mereka ke negara anggota lain melalui insentif, dan karena adanya perlindungan tersebut maka barang yang diperdagangkan bisa saja tidak dapat mencapai harga umum di pasaran. Meskipun beresiko, negara-negara tetap melakukan FTA karena pada dasarnya “negara-negara 'mengakui' langkah-langkah yang sebenarnya baik untuk mereka, dan sebagai imbalannya 'menerima' 'konsesi' dari mitra negosiasi mereka” mengacu pada prinsip klasik GATT. Di balik resiko tersebut, ada ‘manfaat’ yang dirasakan oleh negara-negara anggota, dengan adanya 'trade creation', memungkinkan untuk menggantikan pendapatan tarif dengan biaya transportasi dalam FTA kemungkinan besar akan mengalami kerugian, manfaat lain yang didapat adalah secara tidak langsung kepentingan dari negara anggota dapat membawa kepentingan politik mereka (Krueger, 1997).

FTA dalam istilah yang lebih luas, dirujuk oleh Melchior (2018) sebagai semua jenis perjanjian antar subset (himpunan) negara dengan tujuan untuk meliberalisasi perdagangan barang atau jasa. Melchior (2018) mengasumsikan bahwa FTA adalah tentang pengurangan diskriminasi dalam hambatan perdagangan. Dalam hal ini, hambatan perdagangan merupakan tarif yang mana merujuk pada model perdagangan dunia yang disebut “tariff equivalent syndrome”. Dengan adanya pengurangan tarif tersebut (non-tarif), maka kemungkinan adanya diskriminasi perdagangan dalam FTA sangat kecil, tarif merupakan kunci utama, FTA menyebabkan pemotongan tarif yang substansial. Selain itu, dalam ulasan ini juga membahas bahwa dalam FTA terdapat ‘kesetaraan tarif’. Hal tersebut jika dilihat dari kacamata trade policy spillovers, pengurangan biaya perdagangan (tarif) dalam FTA dapat menguntungkan negara ketiga (Melchior, 2018).

Sedangkan, menurut Athurkoral (2020), FTA merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih dengan menghapus tarif-tarif perdagangan antar negara anggota (namun tidak menghapus tarif perdagangan dengan negara yang bukan merupakan anggota). Meskipun demikian, dalam praktiknya, tarif tidak sepenuhnya dihapus, konsesi tarif dilakukan secara selektif karena penyesuaian industri terkait dengan liberalisasi

perdagangan dan lobi atau negosiasi antar negara anggota tentang penetapan tarif. Ketetapan-ketetapan yang disepakati dalam FTA tertuang dalam rules of origins (RoO) yang isinya seperti daftar kriteria kelayakan produk dan preferensi tarif. Dalam FTA perlu menggabungkan dua elemen, yakni konsesi tarif perdagangan dengan RoO untuk mencegah terjadinya 'defleksi perdagangan', perlu adanya pemahaman pasar ketika menyusun RoO.

Tingkat keberhasilan perdagangan dalam FTA tergantung pada dua faktor, yakni 'respons pasokan' dan 'kompatibilitas perdagangan'. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 'respon penawaran' yang mengacu pada kapasitas ekonomi untuk meningkatkan penawaran ekspor dan untuk mencapai keuntungan produktivitas dengan menghadapi persaingan impor di bawah FTA. Faktor-faktor tersebut tak lepas dari faktor-faktor lain untuk menghadapi FTA. Faktor lain ini biasanya berupa kebijakan perdagangan, kebijakan industri, serta infrastruktur kelembagaan seperti pengembangan sumber daya manusia (Athukorala, 2020). Terkait dampak FTA terhadap sektor agrikultur, Hodo (2014) mengulas sebuah negara yang merupakan anggota dari FTA. Dalam ulasannya, dibawah skema FTA, negara mengalami penurunan harga dan peningkatan volume impor dan ekspor. Hal ini dipengaruhi oleh non-tarif yang diberlakukan sehingga memberikan kesempatan pada sektor industri agrikultur sebuah negara untuk mengekspor maupun mengimpor produk dengan mudah. Dengan adanya FTA, sektor pertanian dalam negeri meningkat, produksi sektor pertanian pun juga meningkat, hal ini dipengaruhi oleh daya saing kualitas produk yang semakin meningkat dengan adanya FTA yang mengarah pada peningkatan ekspor produk agrikultur. Dalam upaya meningkatkan sektor pertanian, negara melakukan pameran internasional untuk meningkatkan promosi produk mereka di negara kawasan bekerja sama dengan kementerian pariwisata. Selain itu juga dengan konsolidasi pasar tanah bersama negara kawasan, meningkatkan produktivitas dalam negeri, meningkatkan subsidi untuk para petani, meningkatkan kualitas dan standar produk pertanian dalam negeri, dan jaminan pada produk pertanian (Hodo, 2014).

Dalam ulasan Reid (1983), para peneliti seperti James Walsh dan Joseph Talarico, Tom Becker, dan Michael Czinkota dalam buku *Export Policy: A Global Assessment*, membahas masalah kebijakan ekspor. Reid (1983) menjelaskan bahwa dalam buku tersebut teori kebijakan ekspor merujuk pada hubungan erat antara kebijakan luar negeri, peraturan perdagangan, dan beberapa faktor lainnya. Menurut Michael Czinkota, untuk meningkatkan efektifitas ekspor, maka pembuat kebijakan harus bersinergi dengan pihak swasta (perusahaan) dalam pembuatan programnya dalam hal ini berkaitan dengan promosi ekspor mereka. Dari penjelasan tersebut, maka indikator atau elemen dari kebijakan ekspor adalah sebagai berikut; (1) kebijakan luar negeri mengacu pada peraturan yang mengatur jalannya perdagangan dan upaya untuk mengembangkan ekspor; (2) peraturan perdagangan mengacu pada regulasi dan peraturan seperti persyaratan dokumen dan hal-hal yang memudahkan kelangsungan ekspor (memudahkan para eksportir); dan (3) perusahaan mengacu pada perusahaan perdagangan ekspor sebagai instrumen untuk membuka potensi di perusahaan kecil dan menengah dalam upaya promosi ekspor (Reid, 1983).

Pertama, kebijakan luar negeri diwujudkan dalam kebijakan intervensi pasar berupa perjanjian pembelian dan penjualan bilateral, kredit ekspor, dan bahkan subsidi ekspor mungkin diperlukan untuk mempertahankan atau memperluas pangsa pasar. Kebijakan luar negeri yang lain adalah political rather than economic, yakni dengan membedakan perlakuan yang dilakukan negara eksportir kepada negara importir tergantung hubungan antar kedua negara tersebut, perlakuan “baik” dengan memberikan bantuan makanan atau perdagangan komersial preferensial, sedangkan perlakuan “kurang baik” dengan melakukan penghentian bantuan pangan atau embargo ekspor komersial (Paarlberg, 1982).

Kedua, melalui peraturan perdagangan yang diwujudkan dalam undang-undang atau langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan ketahanan pangan nasional, dalam arti perlindungan produksi, serta berkontribusi pada perdagangan internasional. Peraturan perdagangan nantinya dapat diimplementasikan dalam berbagai program seperti pertukaran kunjungan petani untuk mengetahui kondisi pertanian di masing-masing negara, melindungi produksi dalam negeri dengan diversifikasi pertanian, intensifikasi, dan rencana pembangunan yang diarahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedesaan, menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam produksi (De Freitas, 1990).

Ketiga, perusahaan yaitu berupa program yang mendukung ekspor usaha kecil menengah seperti, pelatihan ekspor; akses ke informasi untuk para pelaku usaha, membangun fasilitas perdagangan; inisiatif e-commerce; dan program pengembangan pemasok (OECD Library, 2020).

Berdasarkan uraian kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin meninjau perjanjian ECFA Cina-Taiwan yang berdampak terhadap kebijakan ekspor Taiwan untuk mendorong ekspor produk agrikultur Taiwan. Kebijakan ekspor agrikultur Taiwan merupakan respon atas perjanjian ECFA antara Cina dan Taiwan yang berpotensi merugikan sektor pertanian Taiwan karena sebenarnya produk pertanian Taiwan tidak memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan Cina. Indikator yang digunakan untuk menganalisa data adalah kebijakan luar negeri, peraturan perdagangan, dan perusahaan. Dari ketiga indikator yang ditinjau tersebut, nantinya penulis akan menemukan kesimpulan dari ketiganya di akhir tulisan ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode analisa data eksplanatif. Data yang digunakan adalah data kebijakan agrikultur terkait dengan ekspor produk agrikultur Taiwan 2011-2018 melalui data sekunder yang dirangkum dari jurnal artikel terkait, laman resmi seperti laman resmi WTO, *Council of Agriculture Taiwan*, *Taiwan Government Agencies*, dan laman resmi lainnya serta dari portal berita terpercaya seperti *Taiwan News* dan *Taiwan Today*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai respon atas adanya Free Trade Agreement (FTA) yang dilakukan oleh Taiwan dan Cina dalam “Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement” (ECFA) yang berpotensi merugikan sektor agrikultur Taiwan, maka Taiwan mengambil langkah melalui kebijakan ekspor untuk mendorong ekspor produk agrikultur Taiwan. Secara umum, dirangkum dari tiga literatur, FTA merupakan perjanjian antara dua atau lebih negara

dengan tujuan mengurangi atau menghapus tarif perdagangan antar negara anggota namun tidak menghilangkan tarif perdagangan pada negara yang bukan merupakan negara anggota dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Rules of Origin (RoO). Terkait dengan sektor agrikultur, pemberlakuan non-tarif yang diberlakukan memberikan kesempatan pada sektor industri agrikultur sebuah negara untuk mengekspor maupun mengimpor produk dengan mudah atau istilahnya adalah liberalisasi perdagangan. Dengan adanya liberalisasi perdagangan, sektor agrikultur rentan mengalami kerugian karena banyak faktor, yang dalam ulasan Chow (2012) Taiwan sebenarnya tidak memiliki keunggulan komparatif dari Cina dalam komoditas agrikultur dan apabila perdagangan dengan Cina sepenuhnya diliberalisasi dalam ECFA tersebut, maka sektor pertanian Taiwan akan terancam turun. Oleh karena itu, Taiwan melakukan respon terhadap ECFA dengan kebijakan ekspor untuk mendorong ekspor produk agrikultur Taiwan yang akan dianalisa melalui tiga elemen, yakni kebijakan luar negeri, peraturan perdagangan, dan perusahaan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Kebijakan Luar Negeri

Taiwan mengambil kebijakan melalui Council of Agriculture (COA) yang melarang impor 830 item produk agro dari Cina, hal tersebut dilakukan untuk mencegah impor produk agro Cina ke Taiwan melalui investasi yang dilakukan oleh Taiwan di daratan Cina yang berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya (COA, 2011). Larangan yang dilakukan Taiwan sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paarlberg (1982) untuk melakukan membedakan perlakuan yang dilakukan negara eksportir kepada negara importir tergantung hubungan antar kedua negara tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan ekspor agrikultur pula, Pemerintah Taiwan terus mengupayakan perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HAKI) pada produk pertanian untuk melindungi hak varietas tanaman, Taiwan menyepakati perjanjian dengan Cina terkait perlindungan HAKI antar selat yang bertajuk '*Cross-Strait Intellectual Property Right Protection Cooperation Agreement*' pada 2011 (COA, 2011).

COA juga turut aktif dalam hal pertemuan kerjasama pertanian bilateral dan konsultasi ekonomi dan perdagangan bilateral, dengan agenda mempromosikan ekspor produk pertanian Taiwan, perlindungan hak varietas tanaman, dan penyediaan layanan konsultasi perikanan. Taiwan melakukan kerjasama bilateral dalam bidang pertanian pada 2012 dengan Vietnam dalam rangka mendorong ekspor babi pembiakan dan Australia untuk mendorong ekspor leci dan lili (COA, 2012). Hal tersebut merupakan bentuk kebijakan intervensi pasar melalui perjanjian pembelian dan penjualan bilateral yang dilakukan Taiwan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paarlberg (1982). Masih dalam perdagangan bilateral, Taiwan juga melakukan kerjasama ekonomi bilateral untuk meningkatkan ekspor pertanian dengan beberapa negara seperti Selandia Baru, Singapura, Vietnam, Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lain (COA, 2013). Taiwan melakukan kerjasama bilateral di tahun 2014 untuk memperkuat kerja sama pertanian internasional, pertukaran antara industri pedesaan serupa, pengembangan saluran penjualan, dan penghapusan hambatan non-tarif untuk ekspor produk pertanian dengan banyak negara antara lain Myanmar, Vietnam, Jepang, Afrika Selatan, Filipina, dan Amerika Serikat (COA, 2014).

Di tahun 2015, upaya meningkatkan ekspor masih dilakukan Taiwan, COA mengadakan total delapan pertemuan dengan negara mitra untuk memajukan kerja sama bilateral di bidang pertanian(COA, 2015). Taiwan masih melakukan kerjasama bilateral untuk mempromosikan berbagai bidang kerja sama teknis, pertukaran industri, dan penghapusan hambatan perdagangan dalam produk pertanian bersama delapan negara antara lain, Thailand, Belanda, Indonesia, India, Hungaria, Kanada, Vietnam, dan Prancis(COA, 2017). Kerjasama pertanian bilateral juga dilakukan oleh Taiwan dengan sembilan negara pada 2018 antara lain Polandia, Indonesia, Filipina, Hungaria, Australia, Inggris, Israel, Afrika Selatan, dan Vietnam(COA, 2018). COA terus memproses pinjaman pertanian khusus yang berorientasi pada kebijakan untuk mempromosikan pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan pedesaan, pinjaman ini diberikan pada petani dan nelayan sebagai modal(COA, 2013). di tahun berikutnya pula Taiwan memberikan pinjaman serupa pada petani dan nelayan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal operasional mereka(COA, 2014). Kebijakan peminjaman yang dilakukan Taiwan sesuai dengan kebijakan intervensi pasar berupa kredit ekspor yang dikemukakan oleh Paarlberg(Paarlberg, 1982).

2. Peraturan Perdagangan

Peraturan perdagangan Taiwan di bidang agrikultur tertuang dalam *Agricultural Development Act* yang berupa undang-undang. Pasal 12 *Agricultural Development Act* yang telah diamandemen pada 2016 terdapat poin-poin yang mengatur tentang pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk kesejahteraan petani dan proyek pemerintah pembangunan pedesaan atau fasilitas kesejahteraan petani(Laws & Regulations Database of The Republic of China, 2016). Sejalan dengan peraturan tersebut, Taiwan meningkatkan kualitas produk pertanian melalui “*Queen Xin Fruit and Vegetable Production Cooperation*” di Kabupaten Changhua dan melalui Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) “*Greenland Farmers’ Cooperative*” di Kabupaten Pingtung untuk membangun konsentrasi produk skala besar dan lokasi distribusi yang memenuhi standar sanitasi dan inspeksi serta karantina buah. Kedua, membangun sistem logistik dan perdagangan yang dimodernisasi untuk produk pertanian dengan merelokasi beberapa pasar buah dan sayuran di beberapa daerah(COA, 2018).

Untuk memudahkan eksportir dalam melakukan ekspor produk pertanian, Taiwan pada 2011 mengizinkan penerbangan dan pengiriman lintas selat langsung (ke Cina) setelah bergulirnya ECFA. Taiwan juga membangun fasilitas pemasaran produk pertanian jangka panjang di Cina melalui merek dagang Certified Agricultural Standards(CAS). Mendirikan titik penjualan dan merek khusus "Wan Xiang" untuk produk agro berkualitas tinggi dari Taiwan memfasilitasi pemasaran produk-produk pertanian Taiwan di daratan Cina dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan petani dan nelayan Taiwan(COA, 2011). Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sesuai dengan yang dikemukakan oleh De Freitas (1990) mengenai pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam produksi.

Council of Agriculture (COA) Taiwan adalah otoritas yang mengatur pertanian di Taiwan pada level nasional yang merumuskan rencana pertanian nasional Taiwan. Pada salah

satu poinnya, COA mengatur masalah semua urusan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan mengenai kerjasama dan pertukaran pertanian internasional (Kuo, Y. & Huang, H., 2020). Mengacu pada peraturan tersebut, COA mempromosikan pertukaran lintas selat antar profesional pertanian pada tahun 2011, 576 grup dari daratan Cina diundang ke Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertukaran profesional (COA, 2011). Pada tahun 2012, Taiwan juga melakukan pertukaran profesional pertanian lintas selat dengan 524 grup dari Cina diundang ke Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertukaran profesional dan juga meninjau aplikasi dari 137 grup pelaku bisnis pertanian dari Cina untuk datang ke Taiwan (COA, 2012). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh De Freitas (1990) implementasi peraturan perdagangan dapat diwujudkan dalam program pertukaran kunjungan petani untuk mengetahui kondisi pertanian di masing-masing negara.

3. Perusahaan

Pemerintah perlu mendukung perusahaan kecil menengah (SME) untuk meningkatkan ekspor produk agrikultur di era perjanjian ECFA, program-program yang dapat mendukung ekspor perusahaan kecil menengah adalah pelatihan ekspor; akses ke informasi untuk para pelaku usaha, membangun fasilitas perdagangan; inisiatif e-commerce; dan program pengembangan pemasok (OECD Library, 2020). Program-program tersebut direalisasikan sebagai berikut, Taiwan mendirikan asosiasi perusahaan eksportir pada beberapa komoditas produk pertanian di 2011, tujuannya mengembangkan pasar domestik dan internasional serta menyesuaikan produksi dan pemasaran selama musim produksi tinggi, guna menstabilkan volume dan kualitas ekspor. Pemerintah Taiwan membentuk Taiwan Banana Exporters Association (TBEA) yang berisikan 23 perusahaan ekspor sebagai anggota dan diintegrasikan untuk meningkatkan zona produksi ekspor khusus pisang (COA, 2011). COA membantu asosiasi agroindustri atau kelompok tani Taiwan dalam mempromosikan dan mengeksportir produk pertanian dengan mengkoordinasikan 27 pameran produk luar negeri dan 71 kegiatan promosi dan pemasaran di luar negeri. Pemerintah Taiwan juga bekerjasama dengan perusahaan sektor swasta untuk membangun tiga basis pemasaran dan penjualan luar negeri jangka panjang untuk secara aktif menembus pasar luar negeri bimbingan dan nasihat pinjaman, berdasarkan kasus per kasus, untuk membantu 10 eksportir produk pertanian sektor swasta untuk meningkatkan pengemasan dan menetapkan merek dagang (COA, 2012).

Dalam upaya meningkatkan ekspor agrikultur melalui perusahaan kecil dan menengah dalam upaya promosi ekspor, COA Taiwan pada 2013 membantu kelompok produk pertanian dalam negeri dan asosiasi petani untuk berpartisipasi sebanyak 26 kali dalam pameran di luar negeri, mengadakan kegiatan promosi dan pemasaran melalui saluran luar negeri sebanyak 40 kali, dan mempercayakan perusahaan swasta untuk mendirikan dan mengelola tiga pusat display produk pertanian Taiwan jangka panjang di luar negeri. COA juga terus membantu para pelaku usaha eksportir, proyek membantu 10 eksportir produk agro dengan sasaran untuk menetapkan merek, meningkatkan citra merek, atau memperkuat merek mereka. Pemerintah Taiwan juga melakukan pameran produk pertanian di Cina untuk mempromosikan ekspor agrikultur mereka dengan membantu

asosiasi petani dan nelayan untuk berpartisipasi dalam total 13 pameran atau pameran perdagangan umum atau khusus di Cina. COA juga membantu asosiasi nelayan dan bisnis terkait untuk mengikuti dalam upaya memperluas pasar ikan kerapu di luar Cina dengan pameran perdagangan internasional besar seperti *FoodEx*, *Seafood Expo*, *Seafood Expo Global / Seafood Processing Global*, dan *Seafood Expo Asia* (COA, 2013).

Upaya yang dilakukan Taiwan meningkatkan ekspor agrikultur melalui perusahaan kecil dan menengah dalam upaya promosi ekspor pada 2014 kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, yakni membantu asosiasi produk pertanian dalam negeri dan asosiasi petani untuk berpartisipasi sebanyak 36 kali dalam pameran di luar negeri dan melanjutkan sektor swasta untuk mendirikan dan mengelola dua pusat *display* produk pertanian permanen Taiwan. Selain membantu asosiasi produk pertanian untuk mengikuti pameran, COA juga mengadakan proyek khusus dalam branding dan ekspor produk agro dengan membantu 10 eksportir produk agro untuk meningkatkan pengemasan dan branding mereka. Untuk promosi di Cina sendiri, COA membantu asosiasi petani dan nelayan dari Taiwan untuk berpartisipasi dalam total 16 pameran atau pameran perdagangan umum atau khusus di daratan Cina (COA, 2014). COA pada 2015 membantu asosiasi bisnis pertanian dalam negeri dan kelompok tani untuk berpartisipasi dalam 39 pameran di luar negeri dan mengadakan 42 acara promosi ekspor untuk menyebarkan informasi tentang saluran penjualan luar negeri. Dalam upaya promosi di daratan Cina, COA membantu asosiasi petani dan nelayan dari Taiwan untuk berpartisipasi dalam total 19 pameran dagang umum atau khusus atau pameran di Cina dan membantu eksportir produk pertanian Taiwan untuk membangun saluran penjualan yang stabil dan berjangka panjang di Cina (COA, 2015). COA masih rutin untuk membantu asosiasi industri dalam negeri dan kelompok tani untuk mengikuti pameran di luar negeri sebanyak 42 kali dalam rangka mempromosikan ekspor produk agrikultur Taiwan pada 2017. COA juga membentuk menyelenggarakan “Agricultural Product Exporters Brand Counseling Project” untuk memberikan pelatihan bagi para pelaku ekspor untuk mengembangkan pengemasan produk dan merek dagang mereka sendiri (COA, 2017). Tahun selanjutnya upaya yang dilakukan Taiwan masih sama, yakni membantu asosiasi industri dalam negeri dan kelompok tani untuk mengikuti pameran di luar negeri sebanyak 31 kali. Taiwan kembali mengadakan “Agricultural Product Exporters Brand Counseling Project” untuk memberikan pelatihan bagi para pelaku ekspor untuk mengembangkan pengemasan produk dan merek dagang mereka sendiri (COA, 2017). Tahun selanjutnya, upaya yang dilakukan Taiwan masih sama, yakni membantu asosiasi industri dalam negeri dan kelompok tani untuk mengikuti pameran di luar negeri sebanyak 31 kali. Taiwan kembali mengadakan “Agricultural Product Exporters Brand Counseling Project” dengan 13 kursus pelatihan untuk pencitraan merek dan menyediakan layanan konsultasi tatap muka untuk manajemen merek, pemasaran, dan saluran penjualan kepada total 46 peserta (COA, 2018).

KESIMPULAN

Sesuai dengan analisa data yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Taiwan melakukan respons melalui kebijakan luar negeri, peraturan perdagangan, dan perusahaan untuk mendorong ekspor agrikultur Taiwan. Untuk melindungi sektor

pertanian, Taiwan dengan tegas melarang produk-produk agrikultur Cina untuk masuk ke Taiwan setelah bergulirnya ECFA. Hal tersebut dilakukan Taiwan agar produk agrikultur Taiwan tidak mengalami penurunan karena kalah bersaing dengan produk agrikultur Cina apabila produk mereka dengan bebas diperdagangkan di Taiwan. Upaya lain yang dilakukan melalui kebijakan luar negeri adalah dengan perlindungan HAKI atas varietas tanaman dan melakukan kerjasama perdagangan bilateral dengan banyak negara untuk semakin meningkatkan ekspor agrikultur.

Dalam peraturan perdagangan, undang-undang mengenai pengembangan agrikultur Taiwan yang telah diamanatkan pada 2016 memiliki poin-poin yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk kesejahteraan petani, COA merumuskan rencana pertanian nasional Taiwan pada salah satu poinnya, mengatur masalah semua urusan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan mengenai kerjasama dan pertukaran pertanian internasional. Program yang dilakukan untuk merealisasikan undang-undang adalah program-program seperti sistem logistik, pusat konsentrasi produk, membangun fasilitas pemasaran produk di Cina, dan pertukaran petani.

Pemerintah Taiwan melalui COA membantu perusahaan kecil menengah (SME) di bidang agrikultur untuk mengekspor produk mereka dengan pelatihan-pelatihan seperti membangun merek dagang, konsultasi ekspor untuk para eksportir produk agrikultur, dan membantu eksportir untuk memasarkan produk mereka melalui pameran-pameran pertanian yang dilakukan baik di Cina maupun di negara-negara lain. Bentuk respons yang dilakukan Taiwan melalui tiga elemen kebijakan ekspor, yakni kebijakan luar negeri, peraturan perdagangan, dan perusahaan dilakukan untuk mendorong ekspor produk agrikultur yang direalisasikan dalam program-program. Taiwan berusaha meningkatkan performa ekspor pertanian mereka agar tidak tenggelam dengan produk agrikultur dari Cina, dengan tegas Taiwan menolak produk pertanian Cina untuk masuk ke negara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, B. I. (2014). Impacts of the cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement on the grouper fish markets in Taiwan and mainland China. *China Agricultural Economic Review*.
- Albert, E. (2016). *China-Taiwan Relation*. Council on Foreign Relations, 7.
- Armstrong, S. P. (2013). Taiwan's Asia Pacific economic strategies after the Economic Cooperation Framework Agreement. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 18(1), 98-114.
- Athukorala, P. C. (2020). Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics. *Foreign Trade Review*, 55(1), 13-20.
- Chow, P. (. (2012). *National Identity and Economic Interest: Taiwan's Competing Options and Their Implications for Regional Stability*. Springer.
- COA. (2011). *International Cooperation and Agro-Products Trade*. COA Annual Report.

- COA. (2011). Promoting Cross-Strait Agricultural Exchange and Developing New Commercial Opportunities for the Farming and Fisheries Industries.
- COA. (2012). International Cooperation and Agro-Products Exports.COA Annual Report.
- COA. (2012). Promoting Cross-Strait Agricultural Exchange.COA Annual Report.
- COA. (2012). Protecting the Welfare, Rights, and Interests of the Rural Population.COA Annual Report.
- COA. (2013). Main Agricultural Policy Aims for 2013.COA Annual Report.
- COA. (2013). Raising Competitiveness, Leading the Way to Internationalization.COA Annual Report.
- COA. (2013). Strengthening Rural Organizations, Ensuring the Welfare of the Rural Population.COA Annual Report.
- COA. (2014). Main Agricultural Policy Aims for 2014.COA Annual Report.
- COA. (2014). Raising Competitiveness, Leading the Internationalization of Taiwan Agriculture.COA Annual Report.
- COA. (2014). Strengthening Rural Organizations, Ensuring the Welfare of the Rural Population.COA Annual Report.
- COA. (2015). Public Relations and Policy Information Services.COA Annual Report.
- COA. (2015). Raising Competitiveness, Leading the Way in the Internationalization of Taiwan's Rural Economy.COA Annual Report.
- COA. (2017). Increasing Diversified Channels for Domestic and Foreign Sales of Agriproducts.COA Annual Report.
- COA. (2017). Strengthening International Agricultural Cooperation.COA Annual Report.
- COA. (2018). Increasing Diversified Channels for Domestic and Foreign Sales of Agriproducts.COA Annual Report.
- COA. (2018). Strengthening International Agricultural Cooperation.COA Annual Report.
- De Freitas, P. M. (1990). Realities of national and international trade regulations and policies. *HortScience*, 25(1), 35-38.
- Hodo, M. (2014). The impact of Trade Agreements on Agriculture Sector, Import and Export: Albanian Case. *Journal of Educational and Social Research*, 4(4), 421-421.
- Hong, T. L. (2011). The economic cooperation framework agreement between China and Taiwan: Understanding its economics and politics. *Asian Economic Papers*, 10(3), 79-96.

- Krueger, A. O. (1997). Free trade agreements versus customs unions. *Journal of Development Economics*, 54(1), 169-187.
- Kuo, Y. & Huang, H. (2020, June 01). Agricultural law in Taiwan: overview. Retrieved from Thomson Reuters Practical Law: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-606-6505?__lrTS=20210209080750735&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-606-6505?__lrTS=20210209080750735&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)
- Laws & Regulations Database of The Republic of China. (2016, November 30). Agricultural Development Act. Retrieved from Laws & Regulations Database of The Republic of China: <https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0020001>
- Liu, D. N. (2012). New Economic Development Opportunities for Taiwan in the Post-ECFA Era. *Asie. Visions*, 51, 1-41.
- Mainland Affairs Council. (2021, March 04). Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA). Retrieved from Mainland Affairs Council: <http://www.mac.gov.tw/public/data/051116322071.pdf>
- Melchior, A. (2018). *Free Trade Agreements and Globalisation. the Shadow of Brexit and Trump*. Cham: Palgrave Macmillan, 276.
- OECDiLibrary. (2020). Chapter 6. SME export policies in Brazil. Retrieved from OECDiLibrary: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3b736839-en/index.html?itemId=/content/component/3b736839-en>
- Paarlberg, R. L. (1982). Food as an instrument of foreign policy. *Proceedings of the Academy of Political Science*, 34(3), 25-39.
- Reid, S. D. (1983). Export Trilogy Sets Research Agenda. Taiwan ICDF. (n.d.). Agriculture. Retrieved from <https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12410&ctNode=29859&mp=2WorldTradeOrganization>. (n.d.). Trade Facilitation . Retrieved September 14, 2020, from https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
- WTO. (2021, March 04). Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement. Retrieved from WTO: <http://rtais.wto.org/rtadocs/713/TOA/English/Combined%20ECFA%20Text.pdf>